

**TINJAUAN SIYASAH TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG OPTIMALISASI
PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (SH) dalam Hukum Tata Negara Islam**



**Oleh
Rahmatang
NPM. 1521020291
Jurusan : Siyasaḥ Syar'īyyah**

**Pembimbing I :Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II :Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Rahmatang
NPM	: 1521020291
Jurusan/Prodi	: Siyasah Syar'iyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2019
Penulis,

Rahmatang
1521020291

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim, dimana luas wilayah lautnya mencapai dua pertiga dari luas daratan. Artinya, laut dengan kekayaan yang ada didalamnya, merupakan sumber kekayaan negara yang harus dikelola dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara baik, sehingga selain mendatangkan nilai ekonomis bagi negara (pemerintah pusat maupun daerah), juga terjaga kelestarian ekosistemnya secara berkelanjutan.

Lampung sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, sebagian wilayahnya juga merupakan laut yang kaya dengan sumber kelautan dan perikanan. Pemerintah Daerah (Provinsi) telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2014 tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang tujuannya tidak lain adalah agar pemanfaatan kelautan dan perikanan tetap terjaga kelestarian dan ekosistemnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dari judul skripsi ini adalah apa yang dimaksud dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan bagaimana tinjauan siyasah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif analisis. Artinya, penulis mengkaji atau menganalisa Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 di atas dengan pendekatan (kajian) norma Hukum Islam (Siyasah). Data yang dihimpun bersumber pada kajian pustaka baik terkait dengan Peraturan Daerah maupun ketentuan-ketentuan siyasahnya sebagai acuan dalam menganalisis Peraturan Daerah yang dimaksud.

Hasil dari analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 adalah norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan baik oleh masyarakat maupun lembaga atau badan usaha bidang kelautan. Dalam Peraturan Daerah tersebut memiliki kelemahan atau kekurangan yaitu dalam bidang sanksi administrasi yang belum diatur. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 yang intinya agar dalam pemanfaatan kelautan dan perikanan didasarkan atas tanggung jawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara maksimal dan. Dalam perspektif siyasah hal-hal tersebut merupakan mashlahah ammah (kebaikan masyarakat luas atau daerah) yang merupakan salah satu tugas pemimpin.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Siyasaah Terhadap Perautuan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 12
Tahun 2014 Tentang Optimalisasi
Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan.**

Nama : Rahmatang

NPM : 1521020291

Jurusan : Siyasaah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195509191982032004

Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 197304142000032002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasaah**

Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Siyasah Terhadap Pertauran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan."** Disusun oleh, Rahmatang, NPM :1521020291, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 3 Desember 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. 

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. 

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. 

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. 

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum. 



Fakultas Syariah

Enairuddin, M.H.

196210221993031002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Q.S Ar-Ruum ayat 41

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹



¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung, 2009), h. 408.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapakku tersayang, Alimudin, berkat doa dan motivasinya penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan hingga bangku kuliah. Terimakasih yang tiada henti-hentinya untuk bapakku tersayang yang telah berjuang dengan sekuat tenaga demi pendidikan putrimu ini.
2. Ibu tersayang, Siti Aminah, berkat semangat dan nasehatnya yang beliau berikan kepada penulis untuk mencapai cita-cita demi kesuksesanku kelak. Terimakasih telah melahirkan, membesarkan, serta merawatku hingga saat ini, bahkan seluruh dunia pun tak cukup untuk membalas semua jasa-jasamu, namun setidaknya dengan menyelesaikan karya sederhana ini dengan tepat itu sudah sedikit membuatmu bangga dan tersenyum.
3. Kakak-kakakku tersayang, Jusman, Mursalim, Hasanuddin, atas doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya untuk satu-satunya adik perempuan kalian ini, semoga Rahmat, hidayah serta rejeki selalu tercurahkan untuk kalian.

RIWAYAT HIDUP

Rahmatang, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 9 oktober 1996, anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alimudin dan Ibu Siti Aminah, beralamat di Jl. Teluk Bone suka banjar lk 2 Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar pada tahun 2003 di SD N 2 Kota Karang, Bandar Lampung.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2009 di SMPN 6 Bandar Lampung.
3. Pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2012 di SMAN 8 Bandar Lampung.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada jurusan siyasah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Skripsi ini tak akan selesai tanpa waktu dan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawan nya.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.

3. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Sony Pratama, terima kasih atas doa dukungan serta semangat yang tiada henti-hentinya ketika penulis lelah dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara seperjuanganku, Arifah Fadhilah, S.H, Arief Fajar Nugroho, Gilang Ramadhan, Rizki Satria yang telah menghibur dan memotivasi dikala penulis lelah dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara sekaligus sahabat kecilku, Rani Pratista dan Andi Juhana yang setia menemani dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk saudara sekaligus sahabat sekolahku, Tyas, Ayu, Nia, Tami, Dian, Dwijah, Nanda, Vanny, Uki, Eko yang telah memberi semangat serta nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat serta saudara seperjuanganku dikampus, kimel, annisa, rahma, mayang, anggi, fauzi, terima kasih atas doa dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman tercinta siyasa c angkatan 2015 yang telah menemani dari semester awal hingga akhir. Serta rekan-rekan KKN kel. 283 Desa Sekoyoso yang selau memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta yang kubanggakan.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mohon maaf apabila namanya tidak disebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamin Ya Robbal „Alamin*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 9 September 2019

Rahmatang

1521020291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikansi Penelitian	13
H. Metode Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Ruang Lingkup Siyasa, Siyasa Syar'iyah	17
1. Pengertian Siyasa	17
2. Ruang Lingkup Siyasa	27
3. Siyasa Syar'iyah.....	35
B. Tanggung Jawab Pemimpin dalam Islam	46
C. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	53
D. Tinjauan Pustaka	62

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Dasar-dasar Pertimbangan Perda Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	65
B. Gambaran Umum Isi Perda Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	77
B. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Tinjauan Siyasah	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah-pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi “ Tinjauan Siyasah Iddariyyah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan itu sebagai berikut:

1. Tinjauan merupakan pendapatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb), perbuatan meninjau.¹
2. Siyasah merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kata Siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Apabila digabungkan kedua kata fiqh dan al-siyasi maka fiqh siyasah secara istilah memiliki berbagai arti yang salah satunya menurut Imam al-Bujairimi yaitu memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketataatan mereka terhadap pemerintahan.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1281.

Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan), serta menerima perbedaan pendapat.²

Lingkup/bidang siyasah meliputi; siyasah dusturiyyah, siyasah tasyri'iyyah, siyasah qadha'iyyah, siyasah maliyyah, siyasah iddariyyah, siyasah tanfidziyyah, dan siyasah kharijiyyah, terkait dengan judul yang penulis maksudkan siyasah disini adalah siyasah iddariyyah (politik administrasi pemerintahan/negara).

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 adalah suatu bentuk acuan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat aturan bertujuan untuk pemanfaatan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.³
4. Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses untuk membuat sesuatu sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan yang menjadi lebih sempurna, fungsional atau lebih efektif.⁴

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenademia Gruop, 2014), h. 4.

³Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan pasal 36

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800.

5. Pemanfaatan adalah suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.
6. Sumberdaya Kelautan merupakan sumberdaya yang ruang lingkungnya cukup luas yang mencakup kehidupan laut. Mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut. Dan termasuk yang banyak sekali memiliki berbagai sumber yang bisa digunakan dan dimanfaatkan bagi manusia seperti sebagai sumber mineral dan sumber daya nabati.⁵
7. Perikanan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, dengan menggunakan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalisasikan dan memelihara produktivitas sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam meneliti atau memahami suatu masalah tentu ada hal-hal menarik untuk dipecahkan atau dicari formulasi solusi penyelesaiannya. Adapun alasan

⁵Pengertian Pemanfaatan Sumber Daya Laut beserta Contohnya” (On-line), tersedia di: www.dosenpendidikan.com (5 Mei 2019).

penulis memilih judul “ Tinjauan siyasah terhadap peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Alasan Subjektif

- a. Penulis menilai masih banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dan belum sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.
- b. Selain itu permasalahan ini sangat relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan (Hukum Tata Negara)

2. Alasan Objektif

- a. Untuk Mengetahui Apa dan Bagaimana upaya Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diamanatkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

C. Latar Belakang Masalah

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya

negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Negara kita merupakan negara dengan potensi kelautan yang luar biasa. Eksplorasi secara positif dimungkinkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera.

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.

Sumber daya alam (laut) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, yaitu dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu hayati dan non hayati, pengembangan sumber daya alam hayati di perairan Indonesia terdiri dari dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pengembangan, peningkatan produksi yang ditujukan untuk perbaikan mutu gizi, perbaikan konsumsi protein hewani, dan bagi pemerintah untuk peningkatan pendapatan melalui ekspor pendapatan nelayan. Dan pengelolaan (management) yang dilakukan dengan sasaran peningkatan pendapatan nelayan, merangsang

penanaman modal di sektor perikanan, baik melalui modal dalam negeri maupun modal asing.

Menumbuh-kembangkan kesadaran akan pentingnya laut, bagi bangsa yang mendapatkan julukan negara kepulauan dan negara maritim, merupakan sesuatu yang mendesak. Mengingat masih ada anggapan keliru dikalangan masyarakat tentang lautan, salah satunya laut masih dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir, bahkan ada juga yang masih mempercayai makhluk gaib sebagai penguasa dilaut. Dengan berbekal beberapa potongan ayat di Al-Quran yang membicarakan tentang lautan, maka kita dapat menemukan beberapa karunia Allah SWT, yang sangat bermanfaat bagi kemashlahatan hidup manusia.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 dalam pasal 17 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yaitu berisi salah satunya yaitu tentang Pengusahaan Pasir Laut, Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, Industrialisasi Kelautan dan Perikanan, serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan maka sudah jelas bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan sudah memiliki aturan dan larangan untuk tidak merusak segala sesuatu yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan kelautan. Namun, tak sedikit dari masyarakat yang telah melakukan kegiatan yang dapat merugikan kelestarian lingkungan laut.

Mata pencaharian merupakan salah satu kebutuhan wajib bagi kehidupan manusia, namun kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Negara Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, dikenal sebagai negara yang memiliki sumberdaya ikan yang melimpah. Ironisnya, sektor perikanan kita tak kunjung lepas dari beragam masalah.⁶

Pada dasarnya, sumber daya alam di laut dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap memepertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut. Juga sistem penegelolaan dalam mengupayakan sumber daya yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekali pun sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (laut) tak terbatas. Seiring perkembangan teknologi ini telah berkembang jenis-jenis alat penangkapan ikan dimaksudkan untuk mempermudah cara penangkapan dan menghasilkan yang semaksimal mungkin, kondisi yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologiannya akan berakibat kepunahan jenis ikan-ikan baru, kemunduran bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya tergantung dari penangkapan jenis ikan tertentu yang bersangkutan, fungsi kemajuan teknologi di bidang perikanan berangsur-angsur akan mengalami kepunahan. Memperhatikan faktor-faktor diatas, secara prinsip kepunahan itu bukan akan dirasakan dalam jangka pendek melainkan memerlukan waktu yang cukup lama dan baru dirasakan regenerasi nanti, pencegahan yang cukup prinsip dan mendasar yaitu memperhatikan lingkungan laut dengan menghindari kerusakan laut.⁷

⁶Jurnal *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Vol 1 No 1 (2013)

⁷P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, Cetakan Pertama, Mei 1993), h. 31-32.

Pemikiran yang mengarah pada pencegahan kepunahan maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan, di sisi lain diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral, regional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara tertentu.

Keterbatasan pengawasan terhadap luasnya perairan teluk pesisir Lampung menyebabkan kasus-kasus pelanggaran masih sering terjadi. Selama beberapa tahun silam, Polair sudah berhasil mengungkap puluhan kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan, sumberdaya perikanan dan sumberdaya kelautan. Bahkan penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Lampung ini diduga berkelompok dan terorganisasi. Selain itu, untuk peralatan yang digunakan seperti jenis bom ikan yang digunakan dari keterangan para pelaku didapat dari membeli di tengah laut dan juga ada yang membuat sendiri.

Kegiatan yang umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada, dan sudah pasti akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan besar bagi para nelayan. Sebagai salah satu aset yang paling penting, sumberdaya kelautan harus dapat didayagunakan dan dikelola secara seksama oleh Pemerintah.

Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan sumber daya yang relatif kompleks. Dalam hal lingkungan pengelolaan pun sangat berbeda dari sumber daya lainnya. Efek ekonomi yang dihasilkan dari pencemaran terhadap perikanan telah diteliti dalam beberapa studi, dan kemajuan yang telah didapat dalam pemahaman besaran kerusakan ekonomi yang mungkin diakibatkan oleh adanya substansi beracun dan berbahaya dalam habitat ikan.⁸

Siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum secara keseluruhan. Dalam Siyasah lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan Fiqh Siyasah.

Kaidah-kaidah fiqh yang ada dalam khazanah keilmuan *al-qawaid al-fiqhiyyah* pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, pertama yaitu kaidah fiqh yang hanya diperuntukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam arti hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah, kedua yaitu kaidah fiqh yang memang sengaja dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia itu sendiri, selain memang didalamnya terdapat nilai-nilai hubungan vertikal karena objek yang menjadi kajian adalah hukum Islam yang semua

⁸Akhmad Fauzi, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan*, (Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 17.

bersumber dari Allah. Seperti yang diketahui bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum Islam yang objek pembahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut, jika disederhanakan Fiqh Siyasah itu meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional.⁹

Dan apabila dilihat dari sisi hubungan Fiqh Siyasah dilihat dari sisi hubungan, Fiqh Siyasah membicarakan tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret didalam sebuah Negara atau antar Negara dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Kaidah *Ushuliyyah al-Tasyri'iyah* dalam istilah Ushul Fiqh adalah tata aturan yang dijadikan pedoman ijtihad para mujtahid dalam rangka realisasi tujuan hukum. Kaidah *Ushuliyyah al-Tasyri'iyah* adalah kaidah yang dirumuskan secara istiqra dari makna cakupan nash berupa nilai kearifan dan kebijaksanaan syari'ah dalam upaya mewujudkan dan memelihara kemashlahatan umat manusia sebagai tujuan umum syari'ah (Hukum Islam) dan sekaligus sebagai visi umum syari'ah (Hukum Islam) yaitu *ra'iyah al-mashlahah*.¹⁰

Dalam analisis kaidah ini, terdapat dua kata yang saling berhubungan, yang pertama kata *tasharrul imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua *al-mashlahah* (maslahat). Tetapi dari dua hal tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan tersebut, yaitu mashlahat. Ketika kita

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 252.

¹⁰Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 95.

memperhatikan kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ* yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemashlahatan. Dan adapun pengertian yang lebih luas mengenai kaidah tersebut adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dalam metode musyawarah.¹¹

Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemashlahatan, karena metode musyawarah merupakan salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemashlahatan untuk bersama, dan kaidah inilah yang sesuai dengan kajian yang akan diteliti yaitu tentang Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT adalah dengan benar dan dengan maksud dan manfaat tertentu, begitu juga dengan sumberdaya alam seperti laut yang memiliki segudang manfaat. Islam telah melarang umatnya untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berlebihan dan sebaliknya telah dihimbau untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan tersebut secara bijaksana dengan tetap melestarikannya.

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang menyebut kata laut. Sedang kata darat terkandung dalam 13 ayat Al-Qur'an. Jika dijumlahkan, keduanya menjadi 45 ayat. Angka 32 itu sama dengan 71,11 persen dari 45, sedang 13

¹¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), h. 42.

itu identik dengan 28,2 persen dari 45. Berdasarkan ilmu hitungan sains, ternyata memang 77,71 persen bumi ini berupa lautan dan 28,88 persen berupa daratan. Temuan-temuan sains tentang lautan, ternyata telah diungkapkan oleh Al-Qur'an sejak 15 abad lalu.¹²

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Ruum ayat 41, ayat tersebut berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “ *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*”¹³

Terkait dengan hal diatas, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam paradigma pengelolaan kelautan dengan melakukan perubahan pola pikir dari continental approach ke marine approach. Akan tetapi, dalam pemanfaatan sumber daya alamnya sampai saat ini belum terlaksana secara optimal dan masih jauh dari tahap untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pengalaman pembangunan oleh bangsa kita sendiri selama kurun waktu yang panjang ini telah menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang kita lakukan masih masih berorientasi pada pengejaran pertumbuhan ekonomi semata dan masih kurang

¹²Al-qur'an Berbicara tentang Laut “(On-Line), tersedia di : <https://m.kumparan.com/amp/ir-suhelmi/al-quran-berbicara-tentang-laut> (5 Mei 2019)

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung, 2009), h. 408.

memperhatikan aspek pelestarian, pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya secara proporsional, yang pada akhirnya sering menciptakan kegagalan.

Sehingga terdapat beberapa gejala penyusutan kuantitas dan kualitas laut Indonesia yang disebabkan antara lain, oleh kegiatan pencurian, over fishing, perusakan terumbu karang, penggunaan racun atau bom ikan, serta munculnya sikap ketidakpedulian kepada alam. Keselarasan antara budaya dan alam mutlak diperlukan dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia, laut yang merupakan bagian dari alam juga berperan penting karena laut adalah objek wisata, penghubung antar pulau, sumber bahan baku, bahan pangan dan bahan obat-obatan.¹⁴

Maka fakta inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam Tinjauan Siyasah Iddariyyah Terhadap Perda Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini memfokuskan pada upaya pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah provinsi Lampung tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan melihat analisis siyasah dusturiyyah terhadap penerapan peraturan daerah provinsi Lampung tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam pelaksanaannya.

¹⁴Potensi kelautan dan perikanan”, (On-line), tersedia di: www.acedemia.edu/30144897/POTENSI_KELAUTAN_DAN_PERIKANAN_INDONESIA (23 Mei 2019).

E. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Iddariyyah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tersebut?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Iddariyyah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

G. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat Lampung khususnya pada pihak-pihak yang belum memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan mampu memberikan analisis terhadap penerapan

peraturan daerah tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penerapan dan penegakan hukum pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, sedangkan prosedur penelitian membicarakan mengenai urutan kerja penelitiandan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan

dengan menggunakan literatur (ke pustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵

Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan menyimpulkan hasil penelitian dari buku-buku tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan Hukum lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, maka yang mejadi sumber data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah buku-buku atau literatur asli dalam hal ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan buku tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan perspektif fiqh siyasah.

¹⁵SusiadiAS, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 9.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam Perda provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014 serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dengan tidak keluar dari sub pembahasan.¹⁷

Untuk mengumpulkan data yang sebagaimana maksud diatas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

5. Metode Pengolahan Data

Data tersebut berasal dari hasil telaah penulis yang dituangkan dalam bentuk narasi dengan berdasarkan pola pikir deduktif.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *normatif analisis* yaitu ketentuan-ketentuan siyash dari berbagai kaidah-kaidah, prosedur

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h. 9.

¹⁷M. Aziz Firdaus, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: JELAJAH NUSA, 2012), h.

penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁸ Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹



¹⁸Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2002), h. 81

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20s11), h. 107.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Siyasah, Ruang Lingkup Siyasah, Siyasah Iddariyyah Syar'iyyah

1. Pengertian Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafaqihu*-*fiqhan* yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan diatas, bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan didalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu persatu dalil, maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masingada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalil tidak bersifat rinci atau bahkan malah bersifat *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.¹

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4.

Sementara mengenai asal kata *siyasah* dikalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat. *Pertama*, sbagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. sepeninggal Jenghis Khan kitab undang-undang tersebut diwariskan secara turun menurun kepada anak-anaknya yang secara bergantian memimpin kerajaan Mughal di India persis, seperti umat muslim generasi pertama mewarisi al-Qur'an dari Nabi Muhammad Saw. Setelah raja-raja India memeluk Islam isi kitab *ilyasa* itu kemudian dimodifikasi dengan memuat hal-hal yang bersumber dari ajaran Islam, semisal penyerahan otoritas ibadah dan kasus-kasus hukum yang bertalian dengan syari'at Islam kepada *qadhi al-qudhat* (hakim agung).

Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni Bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel *si* dalam Bahasa Persia berarti 30. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata Bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

Ketiga, semisal dianut Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk *mashdar* dari tasrifan kata *sasa-yususu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih

binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda, dalam Bahasa Arab disebut *sa'is*. Kata *sa'is* yang berarti pemelihara kuda ini sekarang telah masuk ke dalam kosata Bahasa Inggris yang ditulis menjadi *syce*. Dalam literatur Yahudi juga ada penggunaan istilah agak mirip dengan makna awal dari kata *sasa* itu yakni istilah *sus*, yang berarti kuda.

Dalam perkembangan berikutnya paling sedikit, *siyasah* mengalami lima macam perluasan makna sebagi berikut. *Pertama*, di masa Khalifah Umar Ibn Khattab dan di masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di masa Bani Abbas, *siyasah* sudah bersinonim dengan kata *statecraft*, yang berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah.

Kedua, di masa Dinasti Bani Umayyah dalam pemakaian yang tidak umum, menurut Ibn Qutaybah, *siyasah* juga digunakan dalam konotasi yang beraura militeristik, yakni kecakapan dalam soal ketentaraan (*siyasah al-jund*). Informasi lain yang bersumber dari Ibn al-muqaffa' menyatakan, *siyasah* di masa Dinasti Bani Umayyah juga telah mengkomodasi pengertian baru, yakni cara penyelenggaraan kekuasaan yang tidak terpuji yang cenderung pada kejelekan dan meninggalkan kebaikan. Sejak saat itulah agaknya dimulai sebuah pencitraan yang negatif dan munculnya kesan kotor terhadap *siyasah*.

Ketiga, di masa Kekuasaan Dinasti Bani Abbas, al-Farabi mengartikan *siyasah* filsafat politik. Makna ini kemudian menjadi makna standar yang

terus digunakan oleh beberapa penulis setelah al-Farabi, terutama mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Helenis (Yunani). Selain makna tersebut, di masa al-Farabi *siyasah* juga telah mendapatkan makna teknis, yakni sama dengan kata politica yang digunakan para filsuf Yunani.

Keempat, pada pertengahan abad ke- 10 yakni seorang penulis bernama Tanukhi memaknai *siyasah* sebagai hukuman fisik yang bersifat berat dan keras, kadang-kadang berupa hukuman mati yang tidak bersumber dari *syariah*, tetapi semata-mata bersumber dari perintah sultan atau bahkan otoritas-otoritas lain, yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu dan atau terhadap tawanan perang. Hukuman jenis ini di masa Kekuasaan Dinasti Turki Usmani disebut dengan istilah *siyasaten*. Pada Abad ke- 13 Abu Shama, seorang penulis kronik asal Damaskus mengartikan *siyasah* sebagai penyaliban terhadap konspirator-konspirator yang prokekuasaan Dinasti Fathimiyyah.

Makna *siyasah* sebagai hukuman berat yang tidak bersumber dari syariat itu kemudian menjadi makna yang umum digunakan dalam Bahasa Persia dan Turki. *Siyasatgah* dalam Bahasa Persia dan Turki, misalnya, bukanlah berarti tempat politik dan pemerintahan, melainkan tempat di mana penyiksaan atau eksekusi hukuman mati dilaksanakan. Pasca munculnya makna tersebut, utamanya di masa Dinasti Mamluk, lazim dilakukan dikotoi antara hukuman-hukuman berat yang bersumber dari syariat yang lazim disebut hudud dan hukuman-hukuman berat yang ditetapkan para penguasa tanpa merujuk kadar dan jenis hukuman yang

ditetapkan dalam syariat yang pada zaman itu lazim disebut *siyasah*, yang dalam istilah *fiqh jinayah* dikenal dengan istilah *ta'zir*. Sebagai imbasnya, para penguasa Mesir dan Turki, mulai mengakui adanya dua jenis keputusan pengadilan, yakni *syariah* dan *siyasah* yang masing-masing diputuskan di pengadilan yang terpisah oleh para hakim yang berbeda pula antara satu darinyang lainnya.

Mengingat *siyasten* atau hukuman berat versi pemerintah itu berpotensi menyimpan sesuatu yang kontradiktif dengan ajaran Islam, dan karena itu sama sekalitidak dapat diterima, maka Ibnu Taimiyyah, berusaha mengingatkan para penguasa pada zamannya agar menetapkan hukum sesuai yang diajarkan Islam dengan menulis sebuah buku berjudul *al-siyasah al-syar'iyyah fi ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyyah* (politik yang sesuai dengan *syariah* bagi perbaikan penguasa dan rakyat) yang didalamnya antara lain dijelaskan mengenai berbagai jenis hukuman berat bagi pelaku kejahatan tertentu sebagaimana diajarkan Islam. Usaha Ibnu Taimiyyah tersebut kemudian dilanjutkan dan dikembangkan dan terutama oleh muridnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menulis buku berjudul *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*.

Kelima, dalam Bahasa Arab modern, yakni bahasa arab pada akhir abad ke-19 dan awal abd ke-20 M dan seterusnya hingga saat ini, *siyasah* mendapatkan makna baru, yakni secara khusus digunakan dalam pengertian politik, dan atau kebijakan, sebuah makna yang kurang lebih

sama pengertiannya dengan makna yang biasa digunakan di Eropa. Setelah itu makna yang lebih tua dari kata *siyasah* itu segera menghilang.

Dari uraian diatas dapat dipahami, secara etimologis *siyasah* dapat mengakomodasi beberapa makna. Untuk dapat menentukan dengan tepat salah satu diantara beberapa makna tersebut, perlu diperhatikan konteks kalimat yang mengikutinya. Melatih, memelihara, atau mengatur binatang, sebab konteks kalimat tersebut memang merujuk kepada makna demikian, sehingga tidak dapat diartikan dengan makna lain.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat menghantar lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzbur mendefinisikan *siyasah* yaitu mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemashlahatan.

Secara redaksional ketiga definisi *siyasah* yan dikutip diatas berbeda antara satu dari yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendaknya sesungguhnya sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa *siyasah* merupakan sebuah terminologi yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.

Setelah diuraikan definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah* yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai berikut, ilmu *siyasah syar'iyah (ilmu fiqh siyasah)* adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemashlahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

Pada kutipan diatas kita diperkenalkan dengan istilah *siyasah syar'iyah* ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literatur *fiqh*

siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis *siyasah*. *Pertama, siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. *Kedua, siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Dasar pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh intitusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokokmbagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai mcam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syari'at-Nya. Jadi, sumber dari *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia itu sendiri serta lingkungannya.

Berbeda dengan *siyasah syar'iyah*, *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber dari manusia sendiri dan lingkungannya, seperti *ara' ahl bashar* (pandangan para ahli atau pakar), *al-'urf* (uruf), *al-'adah* (adat), *al-tajarih*

(pengalaman-pengalaman), *al-awda' al-maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan bersifat dinamis, karena adat-istiadat, pengalaman, budaya, dan pandangan manusia itu pasti berbeda-beda dan terus menerus berkembang sejalan dengan perbedaan waktu, situasi, dan kondisi yang mengitarinya.

Dengan demikian, ilmu *fiqh siyasah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.

Setiap produk *siyasah syar'iyah* pasti Islami. Namun tidak demikian halnya dengan *siyasah syar'iyah* dengan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah wadh'iyah*, sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun, hal ini bukan berarti setiap *siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat.

- d. Untuk menegakkan keadilan.
- e. Dapat mewujudkan kemashlahatan dan mampu menjauhkan kemudaratannya.
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Di samping berbeda sumber pembentukannya, sebagaimana dijelaskan di atas, *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan menghantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Ditinjau dari sisi keabsahannya, *siyasah* juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Tolok ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). Kedua macam *siyasah* dimaksud dalam *pertama*, *siyasah 'adilah* (*siyasah* yang adil). *Kedua*, *siyasah zhalimah* (*siyasah* yang zalim). *Siyasah* yang adil adalah *siyasah* yang haq (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. *Siyasah* yang zalim adalah *siyasah* yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama.

Membuat peraturan tentang mata uang, lalu lintas, pertambangan, pertanian perindustrian, transportasi, telekomunikasi, dan urusan umum lainnya adalah perlu dan sejalan dengan agama, asal didalam peraturan itu tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan agama. Peraturan seperti itu

dapat dimasukkan ke dalam *al-siyasah al-a'dilah* dan sekaligus termasuk *al-siyasah al-syar'iyah*.

Membuat kebijakan yang bertentangan dengan suruhan atau larangan agama adalah siyasah yang salah dan zalim, seperti membolehkan kawin secara perdata (*civil marriage*), dan tidak berdasar agama (*religious marriage*), membolehkan perjudian, pemabukan dan pelacuran, melarang berjilbab dan sebagainya. Singkatnya, menghalalkan yang diharamkan agama dan mengharamkan yang dihalalkan agama adalah *siyasah* yang zalim dan batil.

Siyasah yang adil adalah *siyasah* yang perlu ditumbuhkembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, *siyasah* yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam empiriknya adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, dalam waktu yang sama bercampurilah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT melarang menciptakan suasana yang demikian. Dalam al-Qur'an secara sangat tegas dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui.*²

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkaanleema, (Bandung, 2009), h. 7.

Amar ma'ruf nahi munkar dan kontrol sosial berdasar agama sangat diperlukan untuk mencegah yang salah dan memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak, siyasah yang adil telah dicemari siyasah yang zalim.³

Objek studi *fiqh siyasah*, menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan *mukallaf* dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, kendatipun hal yang diatur tidak pernah disinggung baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Dengan kata lain, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan *mukallaf* sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash* syariat yang bersifat universal. Senada dengan pendapat diatas, Abdul Wahab Khallaf menyatakan, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemashlahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

2. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang Lingkup Siyasah dikalangan pakar *fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ada tiga bidang kajian *fiqh siyasah*, yaitu: (1) *siyasah dusturiyyah*; (2) *siyasah maliyyah*, dan (3)

³Mujnar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 15.

siyasah kharijiyyah. Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj, mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni: (1) *siyasah dusturiyyah*; (2) *siyasah tasyri'iyyah*; (3) *siyasah qadha'iyyah*; (4) *siyasah maliyyah*; (5) *siyasah idariyyah*; (6) *siyasah tanfidziyyah*; (7) *siyasah kharijiyyah*.

Siyasah dusturiyyah adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah qadha'iyyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif, sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tentang tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan *fiqh* pada umumnya dan dengan *siyasah syar'iyyah*, yakni sama-sama merupakan produk *ijtihad*. Karena itu, sama-sama membuka peluang terjadinya perbedaan dan perkembangan pendapat. Di samping persamaan, ada pula perbedaan

antara *fiqh*, dengan *fiqh* pada umumnya dan dengan *siyasah syar'iyah*. *Fiqh* berbeda dengan *fiqh* pada umumnya pada fokus kajiannya. Fokus kajian *fiqh* pada umumnya, boleh jadi sangat luas atau sangat umum, termasuk didalamnya mengkaji soal-soal *fiqh siyasah*. Sementara fokus kajian *fiqh siyasah* relatif terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Karena sedemikian luasnya objek kajian *fiqh* itu, maka boleh dikata, setiap kajian *fiqh siyasah* pasti juga merupakan kajian *fiqh*, tetapi tidak setiap kajian *fiqh* merupakan kajian *fiqh siyasah*. Sebagai perbandingan dapat dinyatakan, setiap garam pasti asin, tetapi tidak mesti setiap yang asin itu bernama garam.

Khusus mengenai perbedaan *fiqh siyasah* dengan *siyasah syar'iyah*, dikalangan pakar *fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan *fiqh siyasah* itu merupakan sinonim bagi *siyasah syar'iyah* pendapat lain menyatakan bahwa *fiqh siyasah* berbeda dengan atau bukan merupakan sinonim *siyasah syar'iyah* karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat kontras. Dari kedua pendapat yang paling tepat sepertinya pendapat kedua. Argumentasinya, *fiqh siyasah* merupakan teori-teori politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam yang merupakan produk ulama swasta yang tercantum dalam berbagai macam kitab atau buku *fiqh siyasah* semisal dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* buah karya al-Mawardi, dan karena itu, ia tidak bersifat mengikat dan memaksa selama belum diangkat menjadi sebuah undang-

undang. Dalam kaitan ini, *fiqh siyasah* sama statusnya dengan *fiqh* pada umumnya, yakni sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi atau ditaati selama belum diadopsi menjadi undang-undang. Sebaliknya, *siyasah syar'iyah* merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan (*qawanin*), semisal konstitusi, dan lain-lain yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi nya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyasah syar'iyah* adalah umara atau ulama negeri yang duduk di lembaga legislatif, bukan ulama swasta yang tidak memiliki otoritas politik untuk menyusun *qanun*. Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa pengertian *siyasah syar'iyah* adalah sebagai berikut: Otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemashlahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa subyek penyusunan *siyasah syar'iyah* adalah pemerintah, bukan ulama swasta yang tidak duduk dalam lembaga legislatif. Produknya adalah berbagai peraturan yang tidak bertentangan dengan agama. Karena berbentuk peraturan perundang-undangan, maka *siyasah syar'iyah* itu bersifat mengikat dan memaksa. Dari kutipan diatas terlihat Abdul Wahab Khallaf membadakan *fiqh siyasah* dengan *siyasah syar'iyah*. Untuk padanan *fiqh siyasah*,

sebagaimana disinggung sebelum ini, ia menggunakan istilah ilmu *siyasah syar'iyah*, bukan *siyasah syar'iyah*.

Sedangkan salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maaliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idaariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan

keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemashlahatan bersama. Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah, *qiyas*, *istihsan*, *'Urf*, *adah*, *mashlahah*, *mursalah* dan *istishhab*.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin...*h. 16.

Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja menggunakan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:

1. $\text{تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَّاكَاتِ}$
(Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman).

Berdasarkan kaidah ini pemerintahan Islam dapat mengubah kebijaksanaan atau Undang-Undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam Indonesia, misalnya, sebagian pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi, sehingga harus diamandemen. Di antaranya adalah masa jabatan presiden yang cenderung bersifat karet, sehingga dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.

2. $\text{تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ}$ (Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemashlahatan).

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak

akan efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau diri sendiri. Sebagai contoh, pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan (nepotisme). Disini pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Sejalan dengan prinsip ini, dalam konteks Indonesia, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberatan sebagian rakyat (umat Islam) yang tidak setuju kalau Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Pemaksaan kehendak untuk merealisasikan hubungan dengan Israel tidak sesuai dengan kemashlahatan rakyat.

3. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** (Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum).

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.⁵

Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, adat disini yang dapat

⁵Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 61.

dijadikan dasar hukum tidak boleh pula bertentangan dengan semangat roh syariat Islam.⁶

Sebagai contoh, kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara, meskipun pada dasarnya boleh-boleh saja, harus dicegah oleh pemerintah, karena hal ini membuka peluang bagi terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi. Kalau hal ini terjadi maka pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik dan bersih. Oleh sebab itu, adat atau kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara harus dihilangkan.

4. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
(Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat).

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya. Dalam hal ini, perizinan perjudian, lokalisasi pelacuran dan minuman keras barangkali mendatangkan untung besar bagi devisa negara. Namun bahaya yang diakibatkannya dan kerusakan generasi muda yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Demikian juga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan sumber keuangan negara yang tentu saja bermanfaat bagi perekonomian negara. Namun melihat kenyataan bahwa banyak TKW tersebut yang nasibnya mengenaskan dan sering diperlakukan secara tidak manusiawi serta tidak dapat perlindungan hukum di negeri orang, maka pemerintah harus meninjau kembali

⁶Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), h. 100.

kebijaksanaan pengiriman TKW ke luar negeri. Sebab mudaratnya lebih besar dari pada manfaat yang kita peroleh. Untuk melindungi kemashlahatan masyarakat yang lebih luas, maka pemerintah harus bersikap tegas menghukum berat, seperti hukuman mati, terhadap pengedar dan bandar narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Karena memperhatikan dan menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia dari pengaruh narkoba, jauh lebih mashlahat dari nyawa hanya dengan segelintir pengedarnya. Karena fiqh siyasah merupakan ilmu sosial yang selalu hidup maka pengembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya, seperti metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif, metode deduktif, metode observasi, dan metode dialektis. Dari metode-metode ini kita dapat menimbang, menilai, dan mengapresiasi pemikiran para ulama dan praktik kenegaraan yang berkembang dalam sejarah Islam. Dari sini pula kita bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif yang relevan untuk kondisi sekarang, di samping membuang nilai-nilai negatif dan yang tidak sesuai lagi dengan selain metode-metode tersebut diatas, fiqh siyasah juga perlu ilmu bantu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti sosiologis, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, dan tentu saja ilmu politik dan ilmu kenegaraan.

3. Siyasah Idariyyah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan perumusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. *Siyasah syar'iyah* yang adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kemudaratatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat dikemukakan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudaratatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa dari para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut juga *siyasah wadh'iyah*) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya : Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah.

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemashlahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa', 4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin diantara kamu.*⁷

Bagaimana mengukur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan semangat syariat Islam? Dengan kata lain, bagaimana *siyasah wadh'iyyah* yang bersumber dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari *siyasah syar'iyyah*? Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surah Ali 'Imran, ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maadkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,*

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkaanleema, (Bandung, 2009), h. 87

*maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.*⁸

dan As-Syura, ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*⁹

Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*).
- e. Menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).

Jika diringkaskan, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

⁸Ibid., h. 71.

⁹Ibid., h. 487.

Dari uraian tentang tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Islam dapat disimpulkan bahwa syariat merupakan hukum baku dari Syari' (Allah) yang bersifat mutlak, universal dan masih global. Untuk menjabarkannya secara operasional dalam suatu masyarakat dan masa tertentu, para ulama mengerahkan segenap kemampuan mereka melakukan ijtihad, sehingga hukum-hukum syariat tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Inilah yang kemudian dikenal dengan fiqh yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Salah satu aspek fiqh yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Karena fiqh, termasuk fiqh siyasah, merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak. Di antara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi *siyasah syar'iyah*.

Sebagai ilustrasi dapat disebutkan bahwa perintah untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah syariat yang wajib diikuti, untuk mewujudkannya, para ulama menjabarkan prinsip musyawarah ini ke dalam sebuah lembaga. Rumusan ini, dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama, dikenal dalam sejarah sebagai ahl al-hall wa al-'aqd ini ada yang digunakan oleh suatu pemerintah, maka hal

tersebut menjadi siyasah syar'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat Muslim yang bersangkutan.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa antara fiqh siyasah dan siyasah syar'iyah terdapat hubungan yang erat sekali, meskipun diantara keduanya memiliki perbedaan. Fiqh siyasah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan perundang-undangan dalam satu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Meskipun demikian, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam fiqh siyasah diterapkan dalam dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Untuk memberi perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa fiqh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis, sedangkan siyasah syar'iyah merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.

Dalam sejarah Islam pun terjadi bahwa di antara pemikir fiqh siyasah ada juga yang langsung terjun ke dalam pemerintahan dan bergelut di bidang politik praktis, seperti al-Mawardi (975-1059 M) dan Ibn Khaldun (1332-1406 M). Namun tidak sedikit pula pemikir yang hanya mengemukakan teori politik tanpa terlibat jauh dalam lapangan politik praktis, seperti diperlihatkan oleh al-Farabi (870-950 M) dan Ibn Taimiyah (1263-1329 M).

Dasar-dasar pemerintahan adalah unsur penting dalam format siyasah syar'iyah. Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer maupun sipil, yang harus taat kepada mereka. Jika meminjam istilah untuk negara kita adalah; penguasa sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias politika) dan rakyat atau warga negara.

Sesuai dengan pernyataan Ibn al-Qayim, siyasah syar'iyah harus bertumpu kepada pola syari'ah. Maksudnya adalah semua pengendalian dan pengarahan umat harus diarahkan kepada moral politis yang dapat mengantarkan manusia (sebagai warga negara) kedalam kehidupan yang adil, ramah, mashlahah, dan hikmah. Pola yang berlawanan dari keadilan menjadi dzalim, dari rahmat menjadi niqmat (kutukan), dari maslahat menjadi mafsadat dan dari hikmah menjadi sia-sia. Seperti halnya beberapa definisi diatas, siyasah syar'iyah mengisyaratkan dan unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu pertama, penguasa atau yang mengatur dan kedua, rakyat dan warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Wiryono Prodjodikoro, dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya

mengandung peredaan. Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu khidmah (pelayanan) dan islah (arahan/bimbingan), sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata.¹⁰

Dengan demikian, pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) juga menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia umumnya.

Negara dalam Islam tidak dapat dikatakan sebagai teokrasi seperti dipahami di Barat. Dalam teokrasi, penguasa pemegang pemerintahan berdasarkan mandat dari Tuhan. Sebagai sumber kekuasaan, Tuhan menunjuk sebagian manusia untuk menjadi penguasa atas manusia lainnya. Karena itu, penguasa tidak bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Teokrasi ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam. Negara dalam Islam lebih tepat dikatakan dengan nomokrasi Islam. Dalam nomokrasi Islam, kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul-Nya

¹⁰Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 5.

Muhammad SAW. Sejauh disebutkan secara tegas oleh syariat, maka penguasa tinggal melaksanakan saja apa yang disebutkan dalam sumber al-syariat tersebut, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun karena hukum syariat lebih banyak bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syariat. Tentu saja ijtihad tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemashlahatan manusia dan tidak bertentangan dengan semangat syariat Islam itu sendiri.¹¹

Sebagaimana tersimak dari tulisan-tulisan sebelumnya, *fiqh siyasah syar'iyah* telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhai Allah SWT. Fakta serupa itu, terutama, tampak setelah Rasulullah SAW. Melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Makkah. Sebagaimana dituturkan oleh beberapa sarjana muslim (seperti: Yusuf Musa, 'Abd al-Qadir 'awdah, dan 'Abd al-Karim Zaydan), pada masa itu, Rasulullah lebih memusatkan perhatian perencanaan daripada pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan *fiqh siyasah syar'iyah*. Muhammad Yusuf Musa dan Abd Qadir Zaydan menjelaskan bahwa peristiwa bay'at al-'aqabah, yaitu perjanjian antara Rasulullah SAW. dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Khajraj, baik perjanjian pertama

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...* h. 236.

maupun perjanjian kedua, ini merupakan bukti tahap awal pelaksanaan *fiqh siyasah syar'iyah*. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah, dengan demikian, merupakan artikulasi nilai dasar *fiqh siyasah syar'iyah*. Di Madinah, terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari golongan Muhajirin dengan kelompok Ansor. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW. merupakan pelaksanaan *fiqh siyasah syar'iyah*.

Salah satu contoh pelaksanaan *fiqh siyasah syar'iyah* adalah kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Kebijakan ini merupakan perwujudan dalil *kulliy*, yaitu *al-ukhuwah al-Islamiyyah*. Contoh lainnya adalah perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan komunitas nonmuslim. Sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh komunitas muslim dalam hal ini Rasulullah SAW, namun perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan komunitas nonmuslim. Hal ini tercipta karena Rasulullah SAW mendasarkan kebijakannya atas prinsip *al-ukhuwah al-insaniyyah* yang diwujudkan dalam Piagam Madinah. Kedua prinsip diatas, yaitu *al-ukhuwah al-Islamiyyah* dan *al-ukhuwah al-insaniyyah* merupakan pola

interaksi antar penduduk negara dan kota Madinah, baik hubungan antara muslim dengan muslim atau muslim dengan nonmuslim.¹²

Dalam hal ini siyasah iddariyyah syar'iyyah adalah salah satu bidang yang merupakan ruang lingkup dari fiqh siyasah sekaligus termasuk dalam pembahasan skripsi ini yang pada dasarnya siyasah iddariyyah memiliki arti yaitu politik administrasi negara.

Administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, menurut Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara yang mengemukakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti, yaitu; pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah; kedua, sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) daripada pemerintah; ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu. menurut Bintoro Tjokroamidjojo sebagaimana yang dikutip Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara yang mengemukakan bahwa administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana yang dikutip Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara yang mengemukakan bahwa administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

¹²Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2009), h. 13-14.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas tampak bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu: pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekkend*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintahan dengan para warga negaranya.¹³

Kajian Hukum Administrasi menitikberatkan pada hukum pemerintahan, mencakup tentang kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Hukum Administrasi merupakan instrumen negara hukum dan memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Para ahli hukum mengemukakan definisi Hukum Administrasi dengan rumusan yang bervariasi. Secara umum, Hukum Administrasi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan para warga masyarakat atau rakyat.¹⁴

Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah dikeluarkan nya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2014 tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RAJAGRAVINDO PERSADA, 2014), h. 37

¹⁴Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 238.

mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bidang kelautan, yang merupakan salah satu tujuan Pemerintah Provinsi.

B. Tanggung Jawab Pemimpin dalam Islam

Kekuasaan di dalam Islam adalah tanggung jawab. Kekuasaan tidaklah diberikan kepada seseorang melainkan untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama. Tercapainya tujuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemimpin dan rakyat.

Pemimpin merupakan wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Rakyat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat. Oleh karena itu kewajiban besar menanti tugas seseorang pemimpin Islam. Namun, tugas yang demikian besar itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang pemimpin saja, meskipun dia orang kuat dalam hal apapun, oleh karena itu Islam juga membebankan tanggung jawab ini pada rakyat berupa penuaian terhadap hak-hak imam sebagai timbal balik dari kewajiban seorang imam. Oleh karena besarnya tanggung jawab dan tugas seorang pemimpin di dalam Islam, maka Allah mempersiapkan balasan yang besar pula untuk mereka yang mampu menunaikannya dengan baik. Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah juga sering disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, untuk memimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti Q.S. Al-Anbiyaa ayat 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka yang mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.¹⁵

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim."¹⁶

Dengan demikian, (berdasarkan tinjauan arti imamah secara epistemologi), kata imam berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa imamah itu juga berarti khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pemimpin tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat. Dalam arti lain khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkaanleema, (Bandung, 2009), h. 328.

¹⁶Ibid., h. 19.

menerapkan hukum-hukum syara'. Oleh karena itu tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia di ba'iat oleh umat. Dan pengangkatan jabatan khalifah untuk seorang khalifah dengan ba'iat itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib mentaatinya.¹⁷

Yaitu dengan keharusan seorang pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya sebagaimana yang tercantum dalam HR. Bukhari dan Muslim.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya.*¹⁸

Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Dikalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga abad ke- 20, seperti yang akan terlihat dalam tulisan dibawah nanti. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan dikalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan

¹⁷Agustina Nurhayati, Fiqh Siyasah...h. 137.

¹⁸Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar r.a.

agama dan negara sekaligus, sebagaimana antara lain digemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*al-Islam din wa dawlah*). Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa Kemal Atatürk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia Islam.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemashlahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashah* maupun ketakwaannya, dari yang lain. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara atau imam, tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya

wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama. Contoh terbaik tentang kepala negara setelah Rasulullah Muhammad wafat diperlihatkan oleh Khalifah Abu Bakar dan ‘Umar ibn al-Khaththab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai Khadim al-Ummah (pelayan umat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat Islam.

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.

Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam, dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama *fiqh siyasah*, mengenai hak dan kewajiban kepala negara. Diantaranya yang terkenal adalah al-Mawardi. Dalam karyanya al-Ahkam al-Sulthaniyah, al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara yaitu:

- a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
- b. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
- c. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
- d. Menegakkan *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
- e. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan dari luar.
- f. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
- g. Mengelola keuangan negara seperti *ghanimah*, *al-fai'*, pajak, dan sedekah lainnya.
- h. Menentukan belanja negara (APBN).
- i. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
- j. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi

Lampung nomor 12 tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas-tugas kepala negara hanya dalam empat bidang saja, yaitu:

- a. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran.
- b. Menegakkan keadilan.
- c. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid'ah.
- d. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara tegas oleh *nashsh*. Seperti halnya Gubernur bersama jajarannya menetapkan aturan-aturan yang melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2014.

Sementara Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip Agustina Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah merangkum tugas dan kewajiban kepala negara secara garis besar hanya dua saja, yaitu *pertama*, menjelaskan dan memelihara agama, *kedua*, meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama. Hampir sejalan dengan pendapat ini, A. Hasyimi juga menyebutkan dua kewajiban pokok kepala negara, yaitu menegakkan Islam dan menyelenggarakan urusan-urusan kenegaraan secara umum dalam batas-batas ajaran Islam. Tugas dan kewajiban meliputi keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Orientalis Bernard Lewis sebagaimana dikutip Agustina Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan

kemashlahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.

Kewajiban kepala negara diatas dapat pula dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi rakyatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-nisa ayat 59 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁹

Dalam hal ini, rakyat berhak memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas. Menurut ‘Audah, hak-hak asasi manusia yang wajib dipelihara kepala negara yang ditetapkan oleh Islam jauh sebelum Barat mendengungkannya adalah hak persamaan dan kemerdekaan. Dalam hak kemerdekaan Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ras, bangsa, warna kulit, dan bahasa adakah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Perbedaan di sisi Tuhan

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung, 2009), h. 87.

hanya karena takwanya. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta. Dalam kebebasan berpikir, Al-Qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan pikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.

C. Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Lingkungan laut merupakan salah satu sumberdaya alam yang besar di bumi yang mengandung berbagai hal-hak yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikumpulkan, dipanen, dan di tambang. Hal ini meliputi makanan yang bersumber dari laut, berbagai mineral dan produk minyak bumi dari berbagai sumber. Jumlah rupiah yang diambil dari laut adalah ratusan miliar per tahun, namun kita bahkan belum mulai memanfaatkan beberapa sumber daya yang ada dilautan. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan aset penting yang dimiliki oleh negara Indonesia, demikian juga dengan provinsi Lampung. Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih rendahnya sumberdaya nelayan dan pembudidayaan ikan, sarana dan prasana yang masih terbatas, teknologi penangkapan yang masih

tradisional, lemahnya permodalan, dan adanya beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya tanpa terkendali.

Sumberdaya kelautan dengan kekayaan hayatinya yang akan memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, tentunya dengan sistem pemanfaatan dan pengelolaan yang baik dan benar. Berdasarkan data yang terukur, Indonesia memiliki 95.181 km panjang garis pantai dengan kurang lebih 5,0 juta luas zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki 5 buah pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua, ditambah dengan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Indonesia sampai saat ini masih menumpukan ruang hidup dan ekonomi pada daratan, sedangkan pengelolaan masih tertinggal. Belum semua orang dapat merasakan manfaatnya secara berkeadilan, padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai perairan berupa cluster-cluster yang punya kekayaan unik tersendiri. Berangkat dari kesadaran inilah, pemerintah mulai mengoptimalkan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia dengan tata kelola berbasis zonasi. Pengelolaan yang dibutuhkan bukan sekedar WPP, lebih jauh ditujukan pemerataan kesempatan pemanfaatan oleh pemangku kepentingan dan pemerataan kesempatan setiap jenis ikan untuk tumbuh dan berkembang.

Untuk dapat bersahabat dengan laut, kita harus mampu mengenali karakteristik setiap pantainya. Jenis dan siklus kehidupan ikan dan makhluk hidup lain didalamnya juga perlu diperhatikan. Hal ini sebagai dasar

pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. selain sumberdaya yang akan dimanfaatkan, kita juga harus mengenali populasi manusia yang akan memperoleh manfaat. Berapa banyak daerah yang mayoritas seorang nelayan, jumlah nelayan, jumlah kapal nelayan, serta ukurannya. Kelautan dan perikanan berkelanjutan merupakan tujuan besar kita, maka nelayan atau pengusaha harus mampu menangkap ikan yang diinginkan secara selektif dengan pola tangkap yang benar. Jangan sampai yang pada awalnya bertujuan memanfaatkan kekayaan laut malah merusak kekayaan laut tersebut. Penangkapan ikan secara berlebihan harus segera dihentikan.²⁰

Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dengan garis pantai yang lebih kurang 1.105 km dan 69 pulau-pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda, termasuk lingkungan yang dibuat oleh manusia, seperti tambak udang dan perkotaan. Luas wilayah pesisir sekitar 440.010 ha dan luas perairan laut dalam batas 12 mil adalah 24.820,0 km persegi yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia (pantai barat Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan laut Jawa (pantai timur Lampung). Dengan wilayah pesisir dan laut yang cukup luas, sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Lampung. Dengan jumlah wilayah kelautan yang luas dan lahan perairan yang banyak.

Masalah laut dan perikanan ini, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar jika mulai dari para

²⁰Dendasurono Prawiroatmojo, *Pendidikan Lingkungan Kelautan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008), h. 41.

tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya. Salah satu media yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan adalah Media Kompas yang mengangkatnya dalam sebuah diskusi yang diikuti oleh pemerintah, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad dan segenap jajarannya. Salah satu simpulan pokok dari sajian Kompas dinyatakan bahwa potensi kelautan Indonesia tidak terkira. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 41 yaitu

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*²¹

Penjelasan dari ayat diatas adalah yaitu dengan berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya.

Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketataan. Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi:

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung, 2009), h. 408.

لَخَذُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

Artinya: *Sesungguhnya suatu hukum had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya dari pada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari.*²²

Dikatakan demikian karena bila hukuman-hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi. Oleh sebab itulah kelak diakhir zaman bila isa putra Maryam ‘alaihis salam diturunkan dari langit, ia langsung menerapkan hukum syariat yang suci ini (syariat Islam), membunuh semua babi, semua salip ia pecahkan, dan jizyah (upeti) ia hapuskan. Maka tidak diterima lagi upeti, melainkan Islam atau perang.

Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka. Maksudnya, agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta dan jiwa serta hasil buah-buahan, sebagai suatu kehendak dari Allah buat mereka dan sekaligus sebagai balasan bagi perbuatan mereka.

Agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Maksudnya yakni agar mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya.²³

²²Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 1989), h. 771.

²³Ibid, h, 772.

Luas Lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan dan lain sebagainya. Meski demikian, potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.²⁴

Laut juga termasuk yang banyak sekali memiliki berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan atau digunakan bagi manusia yang diantaranya seperti sebagai sumber mineral dan sumberdaya nabati.

1. Garam untuk dapat digunakan keperluan seperti bahan masakan. Garam mengandung yodium, yang sangat baik dalam mencegah kanker serta menghilangkan jerawat. Garam berasal dari laut yang mengering, dan menyisakan butiran-butiran kristal garam, dalam proses pembuatannya, dapat dilakukan secara tradisional, dengan memanfaatkan tenaga matahari dan api. Atau dengan memanfaatkan mesin. Madura merupakan pulau di Indonesia yang menghasilkan garam dengan kualitas baik. Hanya saja, karena masih memakai cara tradisional, maka produksi yang dihasilkan sangat sedikit.
2. Ikan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan adalah salah satu sumber protein bagi manusia, ikan tergolong sumber daya yang dapat diperbaharui karena mampu berkembang biak. Akan tetapi, akibat dari perburuan yang tidak melihat aspek keseimbangan ekosistem, banyak hewan-hewan laut yang mulai terancam punah. Salah satunya adalah ikan terbang, yang telurnya dianggap sebagai makanan mewah dengan nama

²⁴Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.3.

caviar. Selain itu, mamalia laut seperti ikan paus juga terancam punah, akibat perburuan yang sembarangan.

3. Karbonat diambil dari sebangsa lumut (potash).
4. Fosfat berasal dari tulang-tulang ikan dan kotoran burung yang makanannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk.
5. Sumber minyak dilepas pantai bisa ditemukan di laut Jawa, Sumatera, Malak. Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan.
6. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar.
7. Tumbuhan laut untuk makanan ikan, yaitu plankton, nekton, phytoplankton dan bentos. Kehidupan didalam laut ternyata tidak banyak berbeda dengan ke adaan di darat, di laut juga terdapat makhluk hidup yang terdiri atas tumbuhan laut dan hewan laut. Plankton adalah gabungan dari jasad-jasad hewan dan tumbuhan bersel satu. Plankton tidak dapat bergerak sendiri, tetapi hidup dengan mengapung dipermukaan atau dekat permukaan air laut maka termasuk golongan pasif. Nekton adalah gabungan dari binatang-binatang yang dapat berenang terutama binatang laut. Nekton termasuk golongan pelagis yang bergerak secara aktif. Contohnya : ikan, cumi-cumi, gurita dan lain-lain. Benthos adalah organisme laut yang hidupnya terikat didasar laut. Dari golongan ini ada yang hidup merangkak pada dasar laut. Contohnya : cacing laut, tiram, remis. Tetapi ada juga yang menempel pada dasar laut contohnya : rumput laut, ganggang dan bunga karang.

8. Pasang Surut Air Laut, adalah perubahan ketinggian air laut akibat gravitasi bulan. Pasang surut air laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk bekerja. Dimana nelayan berangkat kerja pada saat sedang pasang, dan pulang pada saat sedang surut. Tidak hanya itu, pasang surut juga dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menyalakan mercusuar yang ada di tebing. Mercusuar berfungsi sebagai pertanda bahwa ada tebing di sekitar daerah tersebut. Selain itu, mercusuar juga membantu kapal menentukan arah.

Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih rendahnya sumberdaya nelayan dan pembudidayaan ikan, sarana dan prasana yang masih terbatas, teknologi penangkapan yang masih tradisional, lemahnya permodalan, dan adanya beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya tanpa terkendali.

Dalam hal ini penggunaan bahan peledak bom rakitan yang digunakan untuk penangkapan ikan di perairan Teluk Lampung merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi sebuah tradisi turun menurun. Dengan dipertahankannya tradisi penggunaan bom ikan oleh para nelayan ini, dikarenakan kondisi perekonomian yang tergolong masih rendah. Mereka beranggapan dengan menggunakan bahan peledak ikan tersebut bisa memperoleh ikan di laut dengan cara cepat dan praktis dan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak, mereka tidak memikirkan dampak-dampak yang akan mereka dapat dengan tanpa mereka sadari bahwa

penggunaan bahan peledak tersebut dapat membahayakan, selain itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Tindakan penggunaan bom ikan dalam penangkapan merupakan tindakan yang melanggar hukum bahkan ada sanksi serta hukuman penjara apabila dilakukan.²⁵

Cara pembuatan bom ikan tersebut pada dasarnya sangat sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus dan siapa saja bisa membuatnya, sehingga dari beberapa tahun lalu hingga sekarang masyarakat sangat antusias dalam pembuatan bom ikan tersebut. Namun, dengan perkembangan teknologi, yang telah mengalami modifikasi atau perkembangan. Dulu, masyarakat menggunakan wadah kelapa sebagai tempat bom ikan tersebut, namun sekarang sudah mengalami perubahan menggunakan bekas botol minuman seperti bekas botol minuman kratingdaeng, modifikasi ini dilakukan karena proses pengerjaan menggunakan wadah buah kelapa memakan waktu yang lama dan sulit, dimana batok kelapa tersebut harus benar-benar kering dan isi kelapa tersebut harus benar-benar habis, dikerok dan dikeluarkan. Menurut masyarakat dalam penggunaan wadah kelapa bisa mencapai 3-4 hari sampai wadah kelapa siap digunakan sebagai bom.

Proses perakitan dari kelapa dan botol bekas minuman ringan ini tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja pada alat ini dibutuhkan sedikit pemberat dimana untuk mencapai sasaran tangkapan maka wadah ini harus tenggelam, maka diharapkan dalam wadah ini ditambahkan sedikit pasir. Tapi perkembangan demi perkembangan wadah pemberat ini mengalami perubahan

²⁵Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, Agustus 2018, Vol 4 No 2.

pula dari pasir menjadi garam. Perbedaan fungsi kedua bahan tersebut yakni pada bahan pasir hanya berfungsi sebagai pemberat saja sedangkan bahan dengan menggunakan garam memiliki multi fungsi disamping sebagai pemberat juga berfungsi sebagai penambah ledakan.

Maraknya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengakibatkan ketersediaan stok pupuk semakin berkurang. Hal tersebut membuat para pelaku mengasah otak. Supaya mereka tetap melakukan pengeboman dalam keadaan bahan baku yang terbatas maka pemanfaatan pupuk dan mengalami modifikasi. Kalau sebelumnya pupuk yang mereka memanfaatkan sebagai bahan bom berasal dari luar negeri, maka karena keterbatasan pupuk dari luar negeri ini, masyarakat memanfaatkan produk dalam negeri dengan membeli pupuk urea yang marak diperjual belikan di pasaran dalam negeri. Menurut sumber jika tidak digoreng, maka pupuk tersebut tidak mengakibatkan daya ledak yang tinggi. Patroli penegakan hukum yang marak dilakukan oleh aparat penegak hukum mengakibatkan masyarakat pelaku pengeboman main kucing-kucingan dengan patroli penegakan hukum. Masyarakat memilih melakukan pengeboman pada waktu siang bolong dan sore hari pada saat matahari terbenam. Di samping itu, masyarakat pengebom melakukan modifikasi bom dengan melakukan peredam suara. Hal ini dilakukan dimana alat bom yang telah dirakit dimasukan kedalam buah pepaya sehingga bunyi ledakan tidak terdengar.²⁶

²⁶Cara merakit bom ikan”, (On-Line) tersedia di : <https://cynditiaprastari.blogspot.com/2012/10/cara-memrakit-menggunakan-dan-dampak.html>, (21 Oktober 2019).

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penulis menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

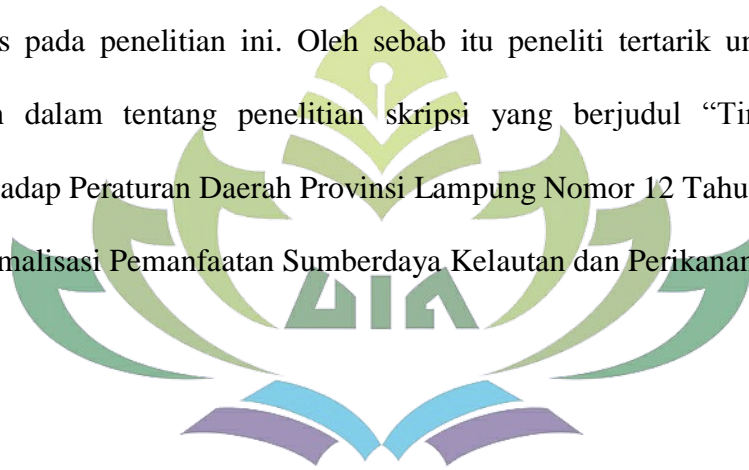
Dalam skripsi Muhammad Marzuki yang berjudul “tinjauan hukum terhadap pemanfaatan perairan pesisir untuk kegiatan usaha di kota Makassar” menegaskan bahwa dengan pertimbangan di kota Makassar khususnya di pantai losari terdapat beberapa kegiatan usaha yang memanfaatkan perairan pesisir untuk melangsungkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa perariran pesisir dapat memberi manfaat yang baik bagi masyarakat yang melangsungkan usahanya.

Skripsi Tedi Putra yang berjudul “implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir dalam wilayah kabupaten selayar di kepulauan taka bonerate” menjelaskan bahwa implementasi Perda No 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir diwilayah Kabupaten Selayar di Kepulauan Taka Bonerate belum berjalan secara efektif hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisai, tidak konsistensinya implementor, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Dalam skripsi Yasir Asl-Halim Ardi Koesoema yang berjudul “pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengendalian

sumberdaya perikanan di kota Bandar Lampung” menegaskan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung sangat berperan penting dalam pengawasan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan adanya tindak tegas bagi nelayan yang melakukan penangkapan secara ilegal dengan menggunakan obat bius, bahan peledak, dan jaring trawl. Memberikan arahan langsung kepada nelayan untuk menggunakan alat-alat penangkapan ikan yang tidak melanggar hukum.

Dari sekian penelitian diatas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasaah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.”



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

B. Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Akhmad Fauzi, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media 2016.

Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.

Dendasurono Prawiroatmojo, *Pendidikan Lingkungan Kelautan*, Jakarta: PT RINEKA, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2009.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu*

Syariah, Jakarta: kencana prenatal media group, 2009.

Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta:

Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

M. Aziz Firdaus, *Metode Penelitian*, Tangerang Selatan: JELAJAH NUSA, 2012.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Doktrin Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

Prenademia Gruop, Jakarta 2014.

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR Jilid 3*, Jakarta:

Gema Insani, 1989.

Mujnar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik*

Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.

P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, Cetakan

Pertama, Mei 1993.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RAJAGRAVINDO

PERSADA, 2014.

Susiadi AS. *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2015.

Sundaya, *Analisis Keuntungan dan Peluang Penggunaan Alat Tangkap Legal dan Illegal di Kabupaten Indramayu*, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andy Offset

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.

C. Jurnal

Jurnal Akhmad Fauzi, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan* Gramedia Pustaka Utama, Vol. I No. 1, 2005.

Jurnal *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Vol. III No. 1, 2013.

Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, Agustus 2018, Vol 4 No 2.

Subani, W. dan H. R. Bares. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 2009.

D. Sumber On-line

“Al-qur’an Berbicara tentang Laut”, (On-Line), tersedia di <https://m.kumparan.com/amp/ir-suhelmi/al-quran-berbicara-tentang-laut> (5 Mei 2019).

“Cara merakit, menggunakan, dan dampak penggunaan bom ikan”, (On-Line) tersedia di : <https://cynditiaprastari.blogspot.com/2012/10/cara-memrakit-menggunakan-dan-dampak.html> (21 Oktober 2019).

Makalah Eksploitasi Ikan menggunakan bahan peledak, (On-Line) tersedia di : <http://kevinarchie6.blogspot.com/2014/01/makalah-eksploitasi-ikan-menggunakan.html> (21 Oktober 2019).

“Pengertian Pemanfaatan Sumber Daya Laut beserta Contohnya” (On-line), tersedia di: www.dosenpendidikan.com (5 Mei 2019).

“Tugas dan kewajiban pemimpin umat Islam” (On-line), tersedia di : <https://m.kiblat.net/2017/10/26/tugas-dan-kewajiban-pemimpin-umat-islam/> (6 september 2019).



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

B. Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Akhmad Fauzi, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media 2016.

Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.

Dendasurono Prawiroatmojo, *Pendidikan Lingkungan Kelautan*, Jakarta: PT RINEKA, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2009.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: kencana prenada media group, 2009.

Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

M. Aziz Firdaus, *Metode Penelitian*, Tangerang Selatan: JELAJAH NUSA, 2012.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Doktrin Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenademia Gruop, Jakarta 2014.

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 1989.

Mujnar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, Cetakan Pertama, Mei 1993.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RAJAGRAVINDO PERSADA, 2014.

SusiadiAS. *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2015.

Sundaya, *Analisis Keuntungan dan Peluang Penggunaan Alat Tangkap Legal dan Illegal di Kabupaten Indramayu*, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.

C. Jurnal

Jurnal Akhmad Fauzi, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan* Gramedia Pustaka Utama, Vol. I No. 1, 2005.

Jurnal *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Vol. III No. 1, 2013.

Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, Agustus 2018, Vol 4 No 2.

Subani, W. dan H. R. Bares. Alat Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 2009.

D. Sumber On-line

“Al-qur’an Berbicara tentang Laut”, (On-Line), tersedia di <https://m.kumparan.com/amp/ir-suhelmi/al-quran-berbicara-tentang-laut> (5 Mei 2019).

“Cara merakit, menggunakan, dan dampak penggunaan bom ikan”, (On-Line) tersedia di : <https://cynditiaprastari.blogspot.com/2012/10/cara-memrakit-menggunakan-dan-dampak.html> (21 Oktober 2019).

Makalah Eksploitasi Ikan menggunakan bahan peledak , (On-Line) tersedia di : <http://kevinarchie6.blogspot.com/2014/01/makalah-eksploitasi-ikan-menggunakan.html> (21 Oktober 2019).

“Pengertian Pemanfaatan Sumber Daya Laut beserta Contohnya” (On-line), tersedia di: www.dosenpendidikan.com (5 Mei 2019).

“Tugas dan kewajiban pemimpin umat Islam” (On-line), tersedia di : <https://m.kiblat.net/2017/10/26/tugas-dan-kewajiban-pemimpin-umat-islam/> (6 september 2019).

